UNIVERSITAS GADJAH MADA
Hak Kreditor Yang Belum Menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit Setelah Berlakunya Perjanjian Perdamaian Atas Jaminan Kebendaan Yang Diperjanjikan Dalam Perjanjian Perdamaian (Studi Kasus Putusan Pailit Sritex)
Rieka, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ashibly, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, MIH Unihaz, Bengkulu, 2018.

Budiono, Herlien, K*umpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2007.

Ginting, Elyta Ras, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

_____, *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.

_____, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.

_____, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.Mukti, Fajar ND, Yulianto Achmad, MH, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2023.

Satrio, J., *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 1*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997).

Sjahdeini, Sutan Remy, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Soenandar, Taryana, Faturahman Djamil, Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, H, Heru Soepraptomo, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016).

Subhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2008.

Jurnal

Athirah, Zahra, Heru Sugiyono, "Kepastian Hukum Putusan Pengesahan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan", Jurnal Interpretasi Hukum Volume 4 No. 3 (Desember 2023): 547-555.

Levithal, Louis E., "*The Early History of Bankruptcy Law", Penn Law Review* Vol. 66 (1918): 227 - 250.

Hak Kreditor Yang Belum Menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit Setelah Berlakunya Perjanjian
Perdamaian Atas Jaminan Kebendaan Yang Diperjanjikan Dalam Perjanjian Perdamaian (Studi Kasus Putusan Pailit Sritex)
Rieka, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Suryono, Arief, "Pengaruh Likuiditas Perusahaan dan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Terhadap Kepailitan Perusahaan", Jurnal Privat Law Volume VIII No. 2 (Juli - Desember 2020): 210-216.

Tesis/Disertasi

Afria, Silfia, "Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Harta Kekayaan Debitor PT. Stareast Sejahtera Group (Studi: Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 5/PDT-SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2018/PN NIAGA.MDN *Jo.* Nomor 11/PDT.SUS-PKPU/2017/PN NIAGA.MDN)", Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada, 2020.

Faruq, Umarul, "Konflik Norma Hukum Kepailitan Dan Hukum Acara Pidana Terhadap Penyitaan Aset Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada, 2024.

Hutauruk, Jeremy Aprilian, "Pembatalan Putusan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Mahkamah Agung Dikaitkan Dengan Pelindungan Hukum Terhadap Kreditor (Studi Putusan Nomor 647 K/PDT.SUS-PAILIT/2021)", Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada, 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Hak Kreditor Yang Belum Menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit Setelah Berlakunya Perjanjian Perdamaian Atas Jaminan Kebendaan Yang Diperjanjikan Dalam Perjanjian Perdamaian (Studi Kasus Putusan Pailit Sritex)
Rieka, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247).

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 yang telah diundangkan dengan yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 perihal uji materiil Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 25 November 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 perihal uji materiil Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 30 serta Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 20 Januari 2022.

Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg perihal Pengesahan Perjanjian Perdamaian PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Panjta Djaja, PT Bitratex Industries, 29 Agustus 2022.

Putusan Mahkamah Agung No. 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 perihal Putusan Pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Panjta Djaja, PT Bitratex Industries, 18 Desember 2024.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian

Hak Kreditor Yang Belum Menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit Setelah Berlakunya Perjanjian
Perdamaian Atas Jaminan Kebendaan Yang Diperjanjikan Dalam Perjanjian Perdamaian (Studi Kasus Putusan Pailit Sritex)
Rieka, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Internet

Arina Zulfa Ul Haq, "Lukminto Bersaudara Gugat Kurator PT Sritex gegara Asetnya Mau Dilelang", Detik.com. https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7959403/lukminto-bersaudara- gugat-kurator-pt-sritex-gegara-asetnya-mau-dilelang (diakses 6 Juli 2025).

Labib Zamani, Ferril Dennys, "Usai Kejagung Sita 72 Mobil, Muncul Kekhawatiran Eks Pekerja PT Sritex", kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2025/07/11/153723378/usai-kejagung- sita-72-mobil-muncul-kekhawatiran-eks-pekerja-pt-sritex (dikases 12 Juli 2025).

Norbertus Arya Dwiangga Martiar, "Iwan Kurniawan Lukminto Disebut Sosok Penting dalam Pengucuran Kredit ke Sritex", kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/iwan-kurniawan-lukminto-disebut-sosok-penting-dalam-pengucuran-kredit-ke-sritex? (diakses 12 Juli 2025).

_____, "Bos Sritex Jadi Tersangka Korupsi Kredit Bank, Kerugian Negara Mencapai Rp 692,9 Miliar", kompas.com, https://www.kompas.id/artikel/bos-sritex-jadi-tersangka-korupsi-kredit- bank-kerugian-negara-mencapai-rp-6929-miliar?open (diakses 12 Juli 2025).

Pandiangan, Eko Ardiansyah, "Langkah Jika Tergugat Tidak Mau Melaksanakan Putusan Pengadilan", Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-jika-tergugat-tidak-mau-melaksanakan-putusan-pengadilan-lt5c5a7264e87a2/ (diakses 20 Juli 2025).

Prasetyo, Aji, "Duo Lukminto Bersaudara Gugat Kurator Sritex Terkait Aset Pailit", Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/duo-lukminto-bersaudara-gugat-kurator-sritex-terkait-aset-pailit-lt684bf2854bb7e/ (diakses 6 Juli 2025).

_____, "Sita Pailit vs Sita Pidana, Perdebatan Yang Tak Kunjung Usai", hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/stories/article/lt63be5c572daad/sita- pailit-vs-sita-pidana--perdebatan-yang-tak-kunjung-usai (diakses 12 Juli 2025).

Wiji Nur Hayat, "Kejagung Periksa Lagi Dirut Sritex Iwan Lukminto Rabu Ini", cnbcIndonesia.com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250616171026-4- 641446/kejagung-periksa-lagi-dirut-sritex-iwan-kurniawan-lukminto-rabu-ini (diakses 12 Juli 2025).